

## **BAB II**

### **NGO POS KEADILAN PEDULI UMAT-HUMAN INITIATIVE (PKPU-HI)**

Dalam bab ini, penulis akan memfokuskan pada penjelasan mengenai NGO secara umum dan membahas tentang bagaimana peran dan pengaruh NGO dalam hubungan internasional. Penulis juga akan memberikan penjelasan tentang NGO Pos Keadilan Peduli Umat-*Human Initiative* (PKPU-HI), peran dan fungsinya, serta kontribusinya dalam dunia internasional, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu sosial kemanusiaan.

#### ***A. Non Governmental Organization (NGO)***

Isu-isu yang berkembang dalam hubungan internasional pasca perang dingin mulai meluas dari yang sebelumnya hanya berfokus pada isu *high politics* seperti isu politik dan keamanan, telah merambah pada isu- isu *low politics* seperti masalah hak asasi manusia (HAM), demokrasi, lingkungan hidup dan isu-isu lainnya yang memiliki pengaruh penting dalam dunia internasional.

NGO merupakan organisasi yang berada dalam ranah sipil dan seringkali bertujuan untuk pengembangan masyarakat, dimana NGO didirikan oleh individu atau sekelompok orang yang biasa didanai secara sukarela. NGO tidak dibatasi dengan dukungan pemerintah, sehingga dalam gerakannya, organisasi ini mampu melakukan program ataupun berbagai macam kegiatan tanpa harus mendapatkan bantuan atau sponsor dari pemerintah. NGO dapat bergerak melintasi batas nasional maupun internasional, dalam berbagai ranah dan mampu memberikan pengaruh pada beberapa aspek.

*Non-Governmental Organization* (NGO) adalah kelompok warga sukarela bersifat nirlaba yang diorganisasikan pada tingkat lokal, nasional, atau

internasional. Berorientasi pada tugas dan didorong oleh orang-orang dengan kepentingan bersama. NGO melakukan berbagai fungsi layanan dan kemanusiaan, membawa perhatian warga negara kepada Pemerintah, mengadvokasi dan memantau kebijakan dan mendorong partisipasi politik melalui penyediaan informasi. Beberapa NGO bergerak dalam isu-isu yang spesifik, seperti mengenai hak asasi manusia, lingkungan ataupun isu kesehatan. Mereka menyediakan analisis dan keahlian yang berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini dan membantu dalam memantau dan mengimplementasikan perjanjian internasional. (NGO)

*The World Bank* mendefinisikan NGO sebagai kelompok dan lembaga yang sepenuhnya atau sebagian besar independen dari pemerintah dan yang memiliki tujuan kemanusiaan atau koperasi daripada tujuan komersial. Mereka adalah agen swasta di negara industri yang mendukung pembangunan internasional; kelompok-kelompok indigenous yang diorganisasi secara regional atau nasional; dan anggota-kelompok di desa-desa. NGO mencakup asosiasi amal dan keagamaan yang memobilisasi dana swasta untuk pembangunan, mendistribusikan makanan dan layanan keluarga berencana dan mempromosikan organisasi masyarakat. Mereka juga termasuk koperasi independen, asosiasi komunitas, masyarakat pengguna air, kelompok perempuan dan asosiasi pastoral, serta *Citizen Groups* yang meningkatkan kesadaran dan mempengaruhi kebijakan. (GDRC, 1990)

Banyak jenis-jenis berbeda dari badan yang saat ini didefinisikan sebagai NGO. Tidak ada definisi tentang NGO yang diterima secara umum dimana dalam keadaan yang berbeda, istilah itu memiliki konotasi yang berbeda pula. Definisi yang tepat bervariasi mengenai apa yang dimaksud dengan NGO serta tantangan untuk menganalisis fenomena NGO masih sangat sulit. Salah satu alasannya adalah bahwa NGO merupakan kelompok organisasi yang beragam yang melakukan desentralisasi, mulai dari kelompok informal kecil

hingga lembaga besar. NGO memainkan peran yang berbeda dan memiliki bentuk berbeda serta bergerak pada kondisi masyarakat yang berbeda-beda pula. (Lewis, 2010)

Meskipun demikian, ada beberapa ciri-ciri mendasar yang harus dimiliki oleh setiap NGO. Sebuah NGO harus bersifat independen dari kendali langsung pemerintah manapun. Selain itu, terdapat tiga karakteristik lain yang diterima secara umum yang mengecualikan jenis badan tertentu dari pertimbangan. Sebuah NGO tidak akan dibentuk sebagai partai politik, akan bersifat nirlaba dan tidak akan menjadi kelompok kriminal, secara khusus tanpa ada kekerasan. (Willetts)

Sejak berakhirnya perang dingin pasca era 1970-an, NGO meningkat sangat pesat. Meningkatnya NGO dalam segi kuantitas, khususnya yang berdiri di negara-negara berkembang, banyak dipengaruhi oleh adanya berbagai konferensi PBB. NGO banyak terlibat secara luas dalam agenda-agenda global, yakni agenda yang berkaitan dengan isu keragaman hayati, sustainable development, dan lain sebagainya (Suharko, 2003).

Dengan menjamurnya LSM yang berdiri di dunia, terjadi pergeseran perspektif yang berkaitan dengan pembangunan internasional. Sebelumnya, negara adalah aktor yang paling kuat dan lebih sering dalam memberikan bantuan untuk negara-negara berkembang sebagai salah satu cara negosiasi. Hal ini pun berubah setelah pasca perang dingin, dimana negara-negara dengan perekonomian yang kuat itu mengalami kemunduran dan pemerintahan di negara tersebut menjadi tidak stabil. Hal ini menghambat pemberian bantuan bagi negara-negara berkembang. Oleh karena itu, NGO pun muncul sebagai aktor yang dapat menjadi alternatif dalam menyalurkan bantuan bagi negara-negara yang membutuhkan. (Makoba, 2002)

Pasca perang dingin, peran dan kontribusi NGO di dunia pun menjadi semakin banyak dan memiliki pengaruh yang penting. Hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat yang pada saat itu berada di bawah kepemimpinan Presiden Bill Clinton. Dimana ketika itu, kebijakan bantuan luar negeri AS difokuskan pada 6 faktor. Beberapa diantaranya adalah membangun demokrasi, mempromosikan perdamaian serta keberlanjutan. Bantuan yang diberikan membutuhkan keterlibatan aktor lain selain negara, hal inilah yang mendorong perkembangan NGO. (Rasyidah, 2014)

Munculnya peran aktor non negara pun menyebabkan lebih banyak tanggung jawab dan memunculkan kritik. Pemerintah, sektor swasta, maupun NGO memiliki wujud yang berbeda serta memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda pula. Pemerintah dan badan-badan yang mengawasi mereka (seperti parlemen) mempunyai tanggung jawab dalam proses pengambilan internasional yang kompleks. NGO dan aktor non negara lainnya dapat memainkan peran lain yaitu dalam pemberian informasi, walau mereka tidak bisa mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri.

Adanya perkembangan sosial yang terjadi menyebabkan isu-isu pun berkembang dengan luas. Untuk menjangkau beragam kondisi yang terjadi, pemerintah tentu membutuhkan informasi atau sumber-sumber tambahan dari aktor lain seperti NGO dan perusahaan swasta. Pemerintah pun telah banyak yang menyadari tersebut.

Keterlibatan dari NGO dalam proses pengambilan keputusan internasional juga mampu menunjang peningkatan legitimasi organisasi internasional dengan mengurangi kesenjangan yang terjadi antara warga dan pemerintah dengan cara membantu dalam menghasilkan pengambilan keputusan berdasarkan dukungan secara umum.

NGO memiliki kemampuan dalam memberikan informasi tambahan yang menjadikan hubungan internasional lebih transparan. NGO mampu mempromosikan nilai-nilai yang lebih dari sekedar kepentingan masing-masing negara dan membantu dalam memantau pemenuhan terhadap hukum internasional. (AIV, 2007)

Setelah perang dingin, arah bantuan dari satu negara ke negara lainnya juga tidak lagi hanya terbatas dari pemerintah suatu negara ke pemerintah negara lainnya, tetapi juga lebih condong dari pemerintah ke NGO, atau NGO ke NGO. Dengan demikian, NGO pun banyak bermunculan yang selanjutnya banyak berkontribusi dan memiliki peran dalam penyaluran bantuan luar negeri yang bersifat lintas batas (Rasyidah, 2014).

### **B. NGO Pos Keadilan Peduli Umat-*Human Initiative* (PKPU-HI)**

Pos Keadilan Peduli Umat- *Human Initiative* (PKPU-HI) merupakan organisasi non pemerintahan yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Organisasi ini didirikan pertama kali pada tanggal 10 Desember 1999 didasari karena adanya rasa kepedulian dari sekelompok pemuda terhadap tragedi kemanusiaan pada tahun 1997 hingga 1999. Pada tahun 1997, negara-negara ASEAN mengalami krisis ekonomi regional yang menyebabkan keterpurukan. Krisis tersebut terjadi karena adanya depresiasi mata uang terhadap dolar Amerika. Diantara negara-negara yang mengalami keterpurukan tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengalami krisis terparah. Hal ini tidak hanya berputar dalam bidang ekonomi, namun juga sudah menyebar ke aspek-aspek lainnya, seperti di bidang politik, pendidikan, budaya, moral, teknologi, bahkan religi. Dengan adanya kondisi dan situasi seperti ini, sejumlah pemuda yaitu Raden Bagus Suryama Majana Sastra, Sahabudin, Agung Notowiguno, dan

Dedi Sularso berusaha menyikapi hal tersebut dengan menyumbangkan kontribusi mereka melalui aksi-aksi dan kegiatan sosial di berbagai daerah di Indonesia, mereka pun menggagas sebuah kesatuan yang bergerak dalam kepedulian publik secara teratur dan terstruktur. Pada 8 Oktober 2001, PKPU ditetapkan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 44. PKPU terdaftar di PBB sebagai NGO dengan “*Special Consultative Status with the Economic Social Council*” Pada 22 Juli 2008. Lalu pada 29 Januari 2010, PKPU resmi terdaftar sebagai Organisasi Sosial Nasional berdasarkan Keputusan Menteri RI No. 08/Huk/2010, serta pada 8 Oktober 2010 terdaftar di UNI Eropa. Di awal tahun 2016, PKPU melakukan spin off dikarenakan diberlakukannya UUD Zakat Nomor 11 Tahun 2011. PKPU HI pun fokus mengelola dana kemanusiaan, dan pada akhir tahun 2016 mengubah nama menjadi PKPU Human Initiative (PKPU, 2017).

PKPU-HI memiliki sebuah visi yaitu, “Menjadi lembaga kelas dunia yang terpercaya dalam membangun kemandirian.” Dan dalam gerakannya, PKPU-HI memiliki beberapa nilai budaya yang tidak boleh dipisahkan dari setiap aktifitasnya, yaitu Jujur, tanggung jawab, kerjasama, cepat dan peduli.

Sebagai salah satu NGO yang bergerak dalam aktivitas-aktivitas kemanusiaan, PKPU HI memiliki beberapa tujuan yang antara lain adalah (PKPU, 2018) :

1. Terdepan dalam memberikan solusi atas masalah kemanusiaan
2. Terbangunnya loyalitas donatur dan mitra dalam maupun luar negeri.
3. Terciptanya pengembangan lembaga yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan masyarakat.
4. Terbentuknya jaringan kerja dengan azaz saling memberi manfaat.

5. Terbangunnya solidaritas dalam mengembangkan kemandirian masyarakat.

Dalam menggerakkan lembaga ini, PKPU-HI memiliki tiga sikap yaitu: Nilai-nilai Islam, semangat kepedulian, keselarasan universal. Dimana Islam dijadikan dasar dalam setiap aktifitas dan gerak PKPU-HI, serta membawa nilai-nilai kebaikan di dalamnya. PKPU-HI juga memiliki semangat dalam berbagai dan kepedulian untuk menghadirkan solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam masyarakat. PKPU-HI juga melakukan kegiatannya tanpa memandang bulu, pesan yang disampaikan menggunakan bahasa universal.

**Gambar 2.1. Logo Pos Keadilan Peduli Umat-Human Initiative**



**Sumber:** <https://pkpu.org/>

Pada logo di atas, tulisan PKPU dilingkari oleh sebuah bola biru, yang memiliki makna bahwa PKPU menjadi lembaga yang dapat merangkul kegiatan-kegiatan kemanusiaan tidak hanya dalam lingkup Indonesia namun juga untuk dunia. Lebih lanjut, Sri Adi Bramasetia, Vice President PKPU mengatakan bahwa logo PKPU yang dilingkari oleh dunia tersebut berarti mendedikasikan PKPU untuk bekerja rahmatan lil 'alamin bagi seluruh dunia, baik ras, agama, bahasa, maupun golongan. Sementara untuk pemilihan warna logo, pengambilan warna biru karena melambangkan keteduhan, yang mana PKPU berdiri guna memberikan keteduhan dengan solusi-solusi yang ditawarkan untuk permasalahan kemanusiaan. (Republika, 2016)

NGO ini dikelola dengan tata kelola kelembagaan yang terdiri dari, Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Profesional dan Kewajaran yang kesemua itu dijadikan fondasi dalam pembangunan lembaga. Untuk menyokong terwujudnya visi organisasi ini, PKPU-HI melakukan pendayagunaan program, kemitraan strategis, riset dan pengembangan, pembangunan kapasitas, serta mengadakan kerjasama nasional, regional, dan global. Beberapa misi yang dimiliki oleh PKPU-HI adalah:

1. Mendayagunakan program kegawatdaruratan, *recovery*, dan pemberdayaan dalam meningkatkan kualitas hidup dan membangun kemandirian.
2. Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media, dunia akademis (*academia*), dan Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organization* -CSO) lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut lembaga.
3. Melakukan aktifitas penelitian ilmiah, riset, pengembangan, dan pembentukan kapasitas yang berkaitan bagi peningkatan efektifitas peran Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organization* - CSO).
4. Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum kerjasama, dan program sosial-kemanusiaan penting lainnya di level nasional, regional dan global. (PKPU, 2018)

NGO PKPU-HI memiliki 13 kantor cabang yang tersebar di Indonesia yaitu, Aceh, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, NTT, dan NTB. Namun tidak hanya bergerak dalam lingkup nasional, PKPU-HI memiliki peran aktif dan turut berkontribusi dalam dunia internasional. NGO ini memiliki kantor cabang di Korea Selatan dan 11 representatif yang tersebar di beberapa

negara di dunia, yaitu Amerika Serikat, Arab Saudi, Jerman, Australia, Jepang, Malaysia, Singapura, Qatar, Taiwan, Turki, dan Uni Emirat Arab, serta melakukan berbagai program di Palestina, Suriah, Somalia, dan Myanmar. (PKPU, 2018)

PKPU-HI memiliki beberapa sektor yang menjadi unggulan dalam organisasi ini, yaitu:

### 1. *Initiative for Empowerment*

Di dalam sektor ini ada sejumlah program pemberdayaan yang dilakukan oleh PKPU-HI di tingkat individu, keluarga dan lingkungan. Program ini dilaksanakan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan wilayah yang bersangkutan. Program ini bertujuan untuk membangun keswadayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup juga kesejahteraan yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan pendekatan pemberdayaan, PKPU-HI menggunakan proses fasilitasi masyarakat agar sasaran yang dituju bisa memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

### Gambar 2.2. Proses Pemberdayaan Masyarakat



Sumber: <https://pkpu.org/program/initiative-for-empowerment/>

Gambar diatas menunjukkan bagaimana proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh PKPU-HI. Program PKPU-HI ini memiliki sebutan “Klaster Berdaya”, yaitu pemberdayaan masyarakat di berbagai sektor yang ada seperti dalam sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, lingkungan, maupun infrastruktur. Pendekatan pemberdayaan yang dilakukan oleh PKPU-HI ini mealalui proses fasilitasi masyarakat dengan tujuan agar semua potensi yang dimiliki oleh masyarakat mampu diorganisasikan dengan baik dalam memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi. (PKPU)

PKPU-HI memfokuskan program mereka pada pengembangan terhadap potensi sumber daya manusia serta modal sosial masyarakat yang dilakukan melalui pembangunan 3 pilar, yaitu pilar kader berdaya, pilar keluarga berdaya dan pilar kampung berdaya. (PKPU)

Dalam hal ini, yang dimaksudkan Kader Berdaya adalah seseorang dengan usia produktif yang mempunyai kemauan, kekuatan serta ketahanan dalam peningkatan kualitas hidup. Seseorang tersebut juga mampu meningkatkan kesejahteraan yang dimilikinya. Mereka akan mendapatkan bekal yang berupa berbagai pengetahuan serta keterampilan guna menunjang kapasitas sebagai aktor utama dalam upaya terlaksananya program. Sementara Keluarga Berdaya merupakan ikatan kekerabatan yang berisi sekelompok orang dan hidup dalam tempat tinggal yang sama. Kelompok ini terdiri dari orang tua dan anak yang mempunyai kekuatan, kemauan juga ketahanan dalam meningkatkan kualitas hidup serta usaha untuk menunjang peningkatan kualitas hidup. Indikator dari Keluarga Berdaya adalah berpenghasilan dan hidup sehat. Dan yang terakhir adalah Kampung Berdaya. Kampung Berdaya merupakan sebuah komunitas yang mempunyai kemauang, kekuatan serta ketahanan untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Terdapat indikator dari Kampung Berdaya,

yakni Lingkungan yang sehat dan adanya sumber pendapatan masyarakat. (PKPU)

## 2. *Initiative for Disaster*

Sektor ini memiliki sejumlah program yang ditujukan untuk meminimalisir dan mengurangi akibat dari bencana dengan melakukan pemberdayaan potensi dan kemampuan masyarakat dalam mengetahui potensi dari bencana serta membuat persiapan saat menghadapi bencana. Selain melakukan upaya yang sifatnya pencegahan, NGO PKPU-HI pun mempersiapkan tim yang akan dikerahkan saat bencana terjadi. Tim yang dibentuk dibagi kedalam 3 tim kerja, yaitu:

### a. *Tim Disaster Risk Reduction* (Pengurangan Risiko Bencana)

Tim ini memiliki tujuan untuk meminimalisir ancaman serta akibat buruk dari bencana yang terjadi melalui edukasi yang diberikan bagi individu atau kelompok.

### b. *Tim Emergency Response* (Tanggap Darurat)

Tim ini bertujuan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan dari bencana. Tim melakukan kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. (UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana)

### c. *Tim Recovery* (Pemulihan)

Tim ini membantu proses yang dilalui masyarakat pasca terjadinya bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial agar dapat memenuhi kebutuhan. (PKPU, 2017)

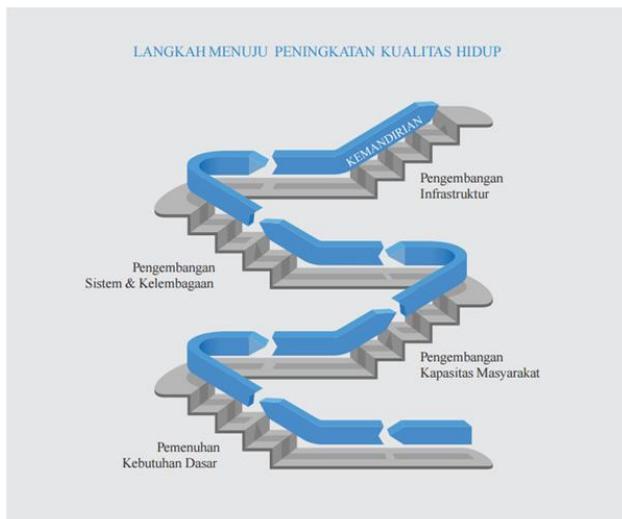
## 3. *Initiative for Children*

Terdiri dari sejumlah program yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan anak-anak yatim

maupun dhuafa dalam bidang pengetahuan dan keterampilan.

PKPU HI memiliki beberapa program yang dilakukan untuk mendukung tujuan tersebut, seperti dengan diadakannya beasiswa pendidikan, pemberian perlengkapan sekolah yang dibutuhkan seperti alat tulis, tas dan lain lain, pemenuhan perlengkapan ibadah, diadakannya pelatihan untuk keterampilan dan lain sebagainya.

### Gambar 2.3. Langkah PKPU-HI dalam Meningkatkan Kualitas Hidup



Sumber: <http://pkpu.org/wp-content/uploads/2018/05/profile-pkpu-human-initiative.pdf>

Seperti gambar diatas, PKPU-HI memiliki beberapa langkah dalam merealisasikan tujuan dalam masyarakat yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup. Langkah pertama yang dilakukan oleh PKPU-HI adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar, setelah itu NGO ini akan mengembangkan kapasitas masyarakat yang dilakukan lewat berbagai program

kerja, seperti diadakannya pelatihan dan sebagainya, kemudian PKPU-HI akan mengembangkan sistem dan kelembagaan, selanjutnya langkah yang terakhir adalah mengembangkan infrastruktur. Langkah- langkah tersebut dilakukan demi tercapainya peningkatan kualitas hidup, dan demikian masyarakat akan bisa mencapai kemandirian yang diinginkan. (PKPU, 2018)

PKPU *Human Initiative* memiliki target utama dalam melakukan program-programnya, yaitu mengembangkan pengelolaan aset masyarakat yang berkelanjutan. Aset-aset yang dimaksudkan dalam target PKPU-Hi ini adalah manusia, sosial, finansial, serta infrastruktur. (PKPU, 2018)

### **C. PKPU-HI dan Peran Internasional**

Tidak hanya melakukan program- program kemanusiaan di dalam negeri, PKPU-HI juga turut berkontribusi dalam dunia internasional, PKPU-Hi telah melebarkan sayap kepeduliaannya hingga negara-negara lain, seperti bantuan yang diberikan PKPU-HI bagi Rohingya, dimana PKPU HI hingga di akhir Januari 2018 telah membangun 700 unit shelter yang ditujukan untuk Pengungsi Rohingya yang mengungsi di Bangladesh, proses pengerjaan yang dilakukan oleh PKPU-HI ini terbagi dalam dua tahap. Shelter yang dikerjakan ini ditempatkan di Kamp Balokhali 2 dan disebar ke dalam beberapa blok. (Murdaningsih, Republika, 2018)

PKPU-HI memiliki beberapa program dalam penyaluran bantuan, seperti pada tahun 2018, PKPU-HI tidak hanya melakukan penyaluran hewan Qurban ke daerah-daerah terpencil di Indonesia, namun juga menyalurkan hewan qurban ke negara-negara lain yang sedang mengalami krisis dalam hal pangan seperti ke daerah Somalia dan Kenya, LSM ini juga menyalurkannya untuk warga yang menjadi korban dalam konflik perang di Suriah, Thailand, Myanmar, serta bagi warga Rohingya yang mengungsi di Cox Bazaar Bangladesh. (Izzati, 2018)

Pos Keadilan Peduli Umat juga telah beroperasi di Rakhine, Myanmar sejak konflik tahun 2012, sebuah konflik yang menyebabkan banyak sekali orang-orang Rohingya yang akhirnya kehilangan tempat tinggal mereka sehingga warga harus mengungsi ke wilayah lain. Pada awalnya, PKPU banyak memberikan bantuan ke Rohingya dalam hal-hal pokok seperti bahan makanan, tempat tinggal dan fasilitas dalam sanitasi di kamp pengungsian. Penyaluran bantuan ini bukanlah hal yang mudah, karena sejak militer Myanmar melakukan operasi pemulihan keamanan serta penyerangan pada pos-pos perbatasan yang menyebabkan sembilan polisi tewas, Negara Bagian Rakhine pun dinyatakan sebagai wilayah tertutup. Hal ini menyebabkan pihak-pihak luar yang ingin masuk ke wilayah ini menjadi sangat sulit. Namun PKPU-HI berhasil masuk karena adanya kerja sama antara PKPU-Hi dengan mitra setempat.

#### **Gambar 2.4. Sekolah yang Didirikan PKPU-HI di Rakhine**



**Sumber:** <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39754541>

Bantuan yang diberikan oleh PKPU ke daerah ini terus berlanjut dan mengalami peningkatan yang baik, bahkan pada bulan Januari 2017, sekolah permanen pertama yang didirikan oleh PKPU-HI di wilayah konflik Negara Bagian Rakhine

telah diresmikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. PKPU-HI membangun 2 unit gedung yang dijadikan sebagai tempat pendidikan setingkat Sekolah Dasar di Switte, Rakhine. Kedua bangunan ini memiliki kapasitas masing-masing sekitar 300 siswa. Selain itu, fasilitas untuk pendidikan ini tidak hanya ditujukan bagi anak-anak dari kelompok Rohingya, namun juga untuk anak-anak dari etnik Rakhine. (Bomasir, 2017)

Somalia yang sejak akhir tahun 2016 mengalami kekeringan berkepanjangan dan konflik sosial memberikan efek buruk bagi warga Somalia, dimana jutaan orang disana mengalami ancaman kelaparan, tercatat sebanyak 6,35 juta orang di Somalia menghadapi krisis pangan yang diakibatkan oleh kekeringan. Dengan melihat adanya kondisi seperti itu, PKPU-HI un melakukan diskusi dan berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam rangka membahas penyaluran bantuan yang akan diberikan ke Somalia. Bantuan pertama yang disalurkan PKPU-HI adalah paket makanan dan distribusi air minum bagi pusat-pusat penampungan pengungsi, wilayah pedesaan terpencil, serta bantuan air yang dialurkan untuk penduduk, pengungsi dan peternakan. Selain itu, PKPU-HI juga mengadakan pelayanan kesehatan keliling dan pengadaan sumur baru demi membantu penyediaan air di wilayah tersebut. (Murdaningsih, Republika, 2017)

PKPU juga berperan aktif dalam pemberian bantuan bagi warga Gaza, Palestina yang menghadapi situasi sulit, dimana mereka kesulitan dalam mendapatkan bahan makanan. PKPUHI menyalurkan bantuan makanan untuk para pengungsi terutama bagi balita, ibu hamil dan lansia, selain itu PKPU juga memberikan fasilitas alat- alat kebersihan. Untuk memudahkan pertolongan warga akibat agresi Isrel, PKPU turut memberikan bantuan berupa panel surya untuk rumah sakit disana. (Hidayat, 2014) Di tahun 2017, pasca Presiden Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan tentang pengakuan bahwa Yerusalem adalah ibukota dari Israel, wilayah gaza pun menghadapi kondisi yang sulit dimana blokade yang terjadi

semakin diperketat. Hal ini semakin memperparah krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina. Dalam merespon situasi tersebut, PKPU-HI akhirnya melakukan kerjasama dengan mitra lokal untuk mendistribusikan bantuan kesana. Bantuan yang dikirimkan oleh PKPU-HI adalah berupa paket makanan yang disalurkan kepada lebih dari 3500 penduduk Gaza. (Republika, 2017)

PKPU-HI juga merupakan salah satu NGO yang aktif dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke daerah konflik Suriah, PKPU-HI berhasil menyalurkan bantuan kemanusiaan ke daerah konflik sejak Februari 2013. Saat itu, bantuan yang diberikan adalah berupa makanan, pakaian dan perlengkapan dalam menghadapi musim dingin. Selanjutnya PKPUHI terus menyalurkan bantuan kepada korban konflik Suriah yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka serta melakukan tindakan- tindakan yang tepat untuk membantu warga sipil korban perang (Achyar, 2013).

Bantuan yang diberikan oleh PKPU-HI ke Suriah terus berlanjut, di tahun 2018, NGO ini mengirimkan bantuan untuk warga yang menjadi korban perang Suriah. Bantuan yang dikirimkan oleh PKPU-HI adalah berupa alat-alat untuk penanganan medis, tikar, selimut, dan bahan makanan. Bentuk bantuan tersebut diberikan setelah adanya kajian dan koordinasi antara PKPU-HI dengan mitra lokal, dimana yang menjadi kebutuhan prioritas warga Suriah adalah bantuan medis. Hal ini melihat dari banyaknya jumlah korban dari warga sipil namun disisi lain sejumlah rumah sakit hancur dikarenakan adanya serangan udara dari militer Suriah.

PKPU-HI juga telah membangun kompleks perumahan untuk anak-anak korban perang Suriah bersama *IHH Humanitarian Relief Foundation* yang bertempat di Reyhanli, Turki. Lokasi ini berada sekitar 3 KM dari perbatasan Suriah. PKPU bergabung dengan konsorsium berbagai lembaga kemanusiaan internasional dalam rangka membangun perumahan yatim dengan luas lahan total 100 ribu meter

persegi tersebut. (Republika, 2016) Perumahan ini telah diresmikan oleh Presiden PKPU-HI pada akhir 2017 . Perumahan tersebut diberi nama '*Children Living Center*'. (Media Indonesia, 2018)